

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk ciptaan Allah Swt. Baik itu pada manusia, pernikahan dapat menjadi suatu wadah penyaluran kebutuhan biologis bagi manusia yang secara wajar dan menjadi suatu anjuran yg disunnahkan dalam ajaran Rosulullah Saw. Maka dari itu, pernikahan adalah cara yang dipilih oleh Allah Swt., sebagai jalan bagi makhluknya untuk melestarikan keturunan dan hidupnya.¹

Perkawinan mengandung arti kasih sayang kepada Allah, karena perkawinan merupakan hasil dari seluruh kasih sayang antara manusia satu dengan yang lainnya. Perkawinan secara langsung dapat dipandang sebagai prosedur menghasilkan manusia sebagai hamba Allah yang diamanahkan kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi-Nya. Perkawinan yang dilakukan manusia mempunyai arti yang sangat besar, oleh sebab itu Allah menginginkan adanya makhluk manusia tersebut, sehingga daripada itu Allah menciptakan makhluk yakni manusia yang bernama adam pertama kalinya.²

Nikah merupakan salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan tidak hanya sebagai suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan,

¹ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), cet-2, hal.6.

² Faud mohd Fachruddin, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam: Anak Kandung, Anak Tiri dan Anak Angkat*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991), hal. 28.

tetapi dilihat sebagai suatu jalan menuju pintu pengenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, serta pengenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya. Faedah yang ada dalam pernikahan adalah untuk menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah itu dari kebinasaan, sebab seorang perempuan apabila ia sudah menikah maka biaya hidup dan kesejahteraannya ditanggung oleh suaminya.

Adapun dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Bab (1) Pasal (1) disebutkan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dari pengertian tersebut perkawinan mengandung aspek akibat hukum, saling mendapatkan hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang berlandaskan tolong-menolong. Suatu perkawinan adalah merupakan bagian dari pelaksanaan ibadah dalam agama, maka tak lain maksud dan tujuannya yakni mengharap keridhaan Allah Swt.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuan dari perkawinan itu sendiri dijelaskan pada pasal (2) dan (3), sebagai berikut: Pasal (2) “perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah Swt., dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Pasal (3) “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Dalam Al-Quran telah di jelaskan, bahwasanya Allah telah memerintahkan kepada hambanya melaksanakan pernikahan, hal ini disebutkan dalam surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan Kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. An-Nur: 32)³

Tujuan daripada perkawinan menurut agama Islam yakni untuk menentramkan jiwa, melestarikan keturunan, memenuhi kebutuhan biologis, memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang ideal dan malakukan latihan yang praktis dalam memikul sebuah tanggung jawab.

Syariat Islam baik dalam al-Qur’am dan as-Sunnah tidak ada aturan yang secara tegas tentang adanya pencatatan pernikahan. Akan tetapi, yang ada adalah masalah hutang piutang sebagaimana dalam surat al-Baqarah ayat 282, yakni:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ ﴿٢٨٢﴾

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1989), hal. 549.

Artinya: *“hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu)...”* (Q.S. Al-Baqarah: 282)⁴

Dengan perkembangan zaman yang semakin maju, maka hukum islam di Indonesia mengatur bahwa untuk semua yang melaksanakan pernikahan harus dicatat secara sah dan diakui oleh Negara. Hal ini merupakan salah satu upaya negara yang didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan, serta aturan atau hukum yang dibuat agar dapat melindungi martabat pernikahan terlebih lagi bagi seorang perempuan dalam kehidupan rumah tangga nantinya.

Ketentuan pelaksanaan pernikahan di Negara Indonesia, telah diatur pada Undang-undang No.1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 2 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 yang intinya, bahwa setiap perkawinan harus dicatat dengan tujuan agar dapat memiliki kekuatan hukum, serta sah diakui oleh negara. Dalam PP No.9 Tahun 1975 Pasal 2 ayat 2 telah dijelaskan bahwa untuk suatu pernikahan bagi calon mempelai yang beragama Islam harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau biasa yang disingkat KUA, sedangkan yang beragama selain agama Islam maka harus dicatatka di kantor pencatatan sipil. Apabila pernikahan itu tidak dicatatkan maka pernikahan tersebut dianggap sebagai pernikahan dibawah tangan, yang nantinya akan mempunyai dampak terhadap pencatatan akta kelahiran anak yang dilahirkan.

⁴ *Ibid.*, hal. 70.

Dengan melihat ketentuan-ketentuan yang berlaku mengenai pencatatan pernikahan, dapat dimengerti bahwasanya pelaksanaan pencatatan pernikahan tersebut adalah sebagai syarat administratif yang harus dipenuhi. Memang pada dasarnya standar sah atau tidaknya pernikahan itu sendiri ditentukan oleh norma-norma dan atauran dalam agama. Pencatatan pernikahan tersebut diberlakukan karena apabila tidak dicatatkan, suatu pernikahan tersebut tidak akan memiliki kekuatan hukum yang menjaminnya. Dampaknya jelas, bilamana salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum, karena tidak memiliki bukti-bukti yang otentik dari suatu pernikahan yang pernah dilaksanakan. hal yang demikian ini tidaklah sejalan dengan visi misi dan tujuan pernikahan itu sendiri.⁵

Ketentuan yang patut dipenuhi untuk dapat melangsungkan perkawinan yaitu kedua mempelai sudah mencapai batas usia sesuai yang telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan khususnya pada pasal 7 ayat (1), yang berbunyi: (1) perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.⁶ Jika dikaitkan dengan persoalan tersebut, bagi pasangan yang belum mencapai batasan umur yang telah ditentukan, maka orang tua pihak yang bersangkutan harus mengajukan Dispensasi Kawin di lembaga pengadilan agama.

Pengajuan permohonan dispensasi kawin kebanyakan para orang tua memberikan alasan bahwa anaknya telah melakukan hubungan seks pra nikah dan si anak perempuan tersebut terlanjur hamil. Maka sesuai ketentuan yang berlaku

⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 110.

⁶ Pasal 7 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

dalam Kompilasi Hukum Islam, mengenai masalah kawin hamil dijelaskan pada pasal 53, sebagai berikut: (1) Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu terlebih dahulu kelahiran anaknya, (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.⁷ Menurut ketentuan yang dibuat oleh negara seperti diatas, maka dapat dipahami bahwa wanita yang hamil di luar nikah hanya dapat dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Ketentuan tersebut merupakan suatu hukum yang yang berlaku dan harus dilaksanakan oleh KUA sebagai pegawai pencatat pernikahan.

Pernikahan wanita hamil dibawah umur merupakan persoalan yang serius untuk ditanggapi. Banyak faktor yang melatarbelakangi persoalan ini, diantaranya budaya barat yang tidak sesuai norma, maraknya pergaulan bebas, serta teknologi yang semakin canggih dimasa sekarang yang turut memudahkan anak-anak muda mendapatkan informasi yang tidak seharusnya mereka ketahui.

Di usia remaja pola pikir yang dimiliki masih terbilang labil, hal tersebut maka seharusnya para orang tua lebih bisa untuk menjaga dan mendidik moral dan pola pikir seorang anak dimana sudah mencapai diusia remaja. Faktor lingkungan luar (sosialisasi) merupakan suatu hal yang sangat berpengaruh kuat terhadap proses perkembangan kualitas kepribadian seorang anak.⁸

⁷ Pasal 53 Kompilasi hukum Islam Indonesia (Yogyakarta : Pustaka Widyatama, 2004).

⁸ Andi Mappiare, *Psikologi Remaja*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), hal. 67.

Persoalan seperti tersebut haruslah memerlukan perhatian dan ketelitian yang bijak untuk diselesaikan. Hal yang sedemikian terjadi disebabkan karena menurunnya nilai norma, moral, dan etika disebagian masyarakat, lebih khusus mereka yang remaja masih memiliki tingkat kesadaran yang labil. Ketentuan yang dibuat masih sulit untuk dilakukan secara sempurna, untuk dapat memastikan bahwa yang menikahi wanita hamil diluar nikah tersebut adalah laki-laki yang benar menghamilinya. Hal ini disebabkan belum ada peraturan yang menjelaskan lebih lanjut mengenai bagaimana cara yang dilakukan dalam menentukan laki-laki yang benar menghamili wanita tersebut serta hukum bilamana yang menikahi wanita hamil tersebut bukan laki-laki yang menghamilinya.

Dari latar belakang masalah di atas, penulis kemudian tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang “SIKAP KUA TERHADAP PASAL 53 KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi lapangan di KUA kecamatan Singosari)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, KUA adalah lembaga terkecil yang berada dalam wilayah kecamatan. Untuk menjadikan penulisan lebih terfokus dan terarah maka perlu adanya suatu pembatasan, pembatasan di sini lebih terfokus pada pendapat dan pandangan personal yakni kepala KUA ataupun pejabat setempat. Dengan demikian dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. a. Bagaimana pandangan kepala KUA terhadap berlakunya pasal 53 Kompilasi Hukum Islam?

- b. Bagaimana pandangan KUA terhadap perkawinan wanita hamil di bawah umur?
2. Bagaimana pendapat kepala KUA bila wanita yang terlanjur hamil lebih dahulu tersebut dinikahi oleh laki-laki yang bukan menghamilinya?
3. Bagaimana pandangan KUA terhadap perwalian anak akibat kawin hamil?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian sebagaimana yang dilakukan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1.
 - a. Untuk mengetahui pandangan kepala KUA terhadap berlakunya pasal 53 Kompilasi Hukum Islam.
 - b. Untuk mengetahui pandangan KUA terhadap perkawinan wanita hamil di bawah umur.
2. Untuk mengetahui pendapat kepala KUA bila wanita yang terlanjur hamil lebih dahulu tersebut dinikahi oleh laki-laki yang bukan menghamilinya.
3. Untuk mengetahui pandangan KUA terhadap perwalian anak akibat kawin hamil.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil peneltian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan antara lain:

1. Secara praktis, dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kualitatif bagi para pengembang ilmu hukum, masyarakat umum

dan penelitian lain dalam mengkaji sekaligus sebagai informasi dalam mengembangkan rangkaian penelitian lebih lanjut dalam karya ilmiah yang lebih mendalam.

2. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana keilmuan, memberikan masukan dan referensi bagi penelitian, khususnya berkaitan dengan masalah seperti yang dibahas dalam skripsi ini, ataupun setidaknya dapat memperkaya informasi mengenai persoalan tersebut, baik sebagai data perbandingan atau informasi pelengkap dari hasil penelitian yang pernah ada.

E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan apa yang telah dirumuskan pada suatu permasalahan diatas serta tujuan daripada penelitian ini, maka perlu disusun urutan kerja penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini merupakan penelitian yang termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*), penelitian ini adalah salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan literature yang akan digunakan dan kemampuan pengetahuan peneliti.⁹ Maka dengan penelitian yang sifatnya kualitatif ini, penulis berupaya untuk memperoleh hasil yang secara obyektif.

⁹ *Penelitian Lapangan*, Diakses pada tanggal 9 November 2014 dari http://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_lapangan

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Singosari kabupaten Malang. Singosari kota santri, merupakan moto yang dipakai oleh kecamatan Singosari. Dengan demikian, berdasarkan moto yang dipakai, penulis memilih lokasi ini sebagai objek penelitian, karena keinginan penulis untuk melihat dan meneliti mengenai pandangan serta penilaian KUA kecamatan Singosari yang dikenal kota santri terhadap peranan serta keberlakuannya pasal 53 dalam Kompilasi Hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, teknik pendekatan yang dipakai yaitu menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis. Dengan pendekatan Yuridis Sosiologis dimanfaatkan untuk dapat menganalisa dan menjelaskan jawaban dari rumusan masalah sesuai dengan target yang diinginkan dalam penelitian. Penelitian terhadap efektivitas hukum merupakan penelitian yang menjelaskan bagaimana penerapan dan dampak hukum dalam masyarakat. Sehingga dengan pendekatan penelitian semacam ini, peneliti tidak hanya mendapatkan pengetahuan yang lebih dibidang hukum, melainkan juga mendapatkan pengetahuan dalam ilmu sosial.¹⁰

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yang digali atau diperoleh oleh peneliti berasal langsung dari lapangan (lokasi Penelitian) dan yang menjadi sumber data primer

¹⁰ Muslan Abdurrahman, *Sosiologi Dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang: UMM Press, 2009), hal. 103.

dalam penelitian ini adalah pasal 53 Kompilasi Hukum Islam. Pada penelitian ini, data primer yang akan didapatkan yakni melalui hasil wawancara antara peneliti dengan responden dilokasi, berkaitan dengan obyek permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berfungsi untuk dapat menunjang data primer, sekaligus dapat memberikan suatu penjelasan dari data primer. Data sekunder merupakan hasil keterangan publikasi yang bukan termasuk dokumen resmi.¹¹ Data dapat diperoleh antara lain melalui buku-buku, artikel, jurnal, penelitian yang terdahulu, pandangan para ahli, dan informasi-informasi tertulis lainnya baik dalam media elektronik maupun cetak yang mendukung dan sesuai dengan topik penelitian.

c. Data Tersier

Data tersier merupakan data yang digunakan untuk memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap data primer dan data sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

5. Teknik Pengumpulan data

a. Observasi

Adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial dan gejala-gejala psikis untuk kemudian

¹¹ Peter Mahmud Maezuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 141

dilakukan pencatatan.¹² Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden (wawancara) namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi dan kondisi).¹³ Observasi adalah proses yang kompleks, yang tersusun dari proses biologi dan psikologis. Dalam menggunakan teknik observasi yang terpenting ialah mengandalkan pengamatan dan ingatan.¹⁴ Dengan observasi maka dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan sosial yang sukar diperoleh dengan metode lain, dan bertujuan untuk lebih memahami atau mendalami masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan sosial.

b. Wawancara

Adalah Tanya jawab untuk memperoleh informasi atau keterangan akan suatu hal. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh secara langsung antara pewawancara dengan narasumber.¹⁵ Teknik wawancara juga disebut sebuah metode bertatap muka dengan responden untuk mendapatkan data-data yang fakta, ataupun data yang berupa pendapat dari responden. Dalam hal ini, maka peneliti akan mengajukan wawancara yang ditujukan kepada ketua KUA

¹² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hal.62.

¹³ Hendry, *Metode Pengumpulan data*, Diakses pada tanggal 10 November 2014 dari <http://teorionline.wordpress.com/service/metode-pengumpulan-data/>

¹⁴ Husaini Usman, Purnomo Setiady, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011), cet-4, hal.52.

¹⁵ *Teknik wawancara Jurnalistik*, Diakses pada tanggal 10 November 2014 dari <http://regional.kompasiana.com/2013/02/26/teknik-wawancara-jurnalistik-532480.html>

singosari dan satu pegawai KUA singosari, berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya telah dipersiapkan.

c. Dokumentasi

Sebuah cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara mengambil suatu data dari catatan, dokumen tertulis sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini maka dokumentasi diperoleh melalui dokumen atau arsip-arsip dari lembaga yang menjadi lokasi penelitian.

d. Kepustakaan

Ini merupakan cara untuk mengumpulkan bahan-bahan yang digali atau diperoleh dari kepustakaan, diantaranya seperti arsip-arsip, buku-buku ilmiah, dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan agar bisa mendapatkan data dan bahan pelengkap sehingga penelitian ini menjadi sempurna.

6. Analisis Data

Setelah pengumpulan data penelitian sudah mencukupi maka langkah selanjutnya yang dilakukan yaitu menganalisa dan penyederhanaan data yang telah diperoleh menjadi bentuk yang mudah untuk dibaca, hingga akhirnya dapat dihasilkan sebuah penjelasan yang mendalam mengenai permasalahan yang diteliti. Metode analisa yang digunakan adalah *deskriptif kualitatif*, metode ini ialah metode analisa data dengan menggambarkan keadaan atau fenomena melalui kata-kata dan mencari nilai-nilai dari suatu variable yang tidak dapat dijelaskan dengan bentuk

angka-angka, melainkan kedalam bentuk kategori-kategori. Untuk mendapatkan kesimpulan, maka penjelasan yang ada nantinya akan ditulis secara jelas dan terperinci tanpa mengurangi kualitas data yang ada.

F. Rencana Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penelitian ini terdiri dari empat bab, adapun perinciannya sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini berisikan hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami bab-bab selanjutnya yang terdiri dari beberapa sub-bagian yang di dalamnya memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Isi dari bab ini, merupakan penjelasan secara garis besar tentang perkawinan dalam islam yang meliputi pengertian, dasar pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, tujuan dan hikma penikahan. Dan penjelasan tentang perkawinan wanita hamil yang meliputi pengertian, pendapat-pendapat ulama tentang pernikahan wanita hamil. Dan tinjauan umum mengenai pengertian, peran dan fungsi Kantor Urusan Agama Maka dari dua ruang lingkup teori tersebut akan menjadi landasan teori dalam penelitian ini.

BAB III: HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini disusun sebagai bagian dari upaya menemukan jawaban atas pernyataan yang ada dalam rumusan masalah. Selain itu, untuk lebih

mengetahui dan memahami tujuan dan penelitian ini, maka pada bab ini akan memaparkan tentang pembahasan dan analisi data.

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi ini, yang terdiri atas kesimpulan dan saran. Dengan demikian, kesimpulan yang dibuat diambil dari poin-poin keseluruhan hasil penelitian dan akan dikemukakan beberapa saran yang dianggap penting, relevan serta dapat menjadi masukan terhadap pihak-pihak terkait.

